

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN 2019 DI UPTD SD 84 PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**NURHAYATI
NIM. 17.2900.062**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN 2019 DI UPTD SD 84 PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**NURHAYATI
NIM. 17.2900.062**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Keuangan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurhayati

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.062

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2561/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M. 

NIP : 19760604 200604 1 001

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurhayati

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.062

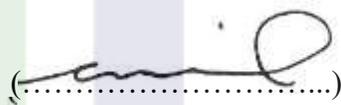
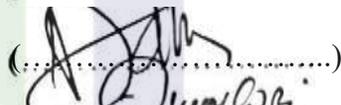
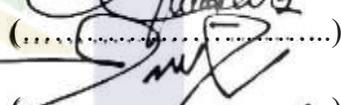
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2561/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022

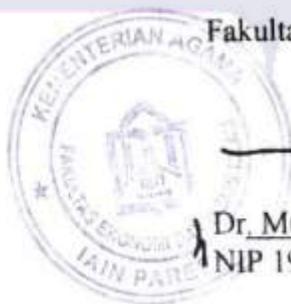
Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ismail dan Ibunda Mansa tercinta yang telah menjadi spirit bagi penulis. Beliauah yang telah mendidik, dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doanya yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Baktiar, S.Ag. M.Pd sebagai Wakil Dekan I FEBI serta Bapak Dr. Usman M.Pd. sebagai Wakil Dekan II FEBI. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
5. Sahabat dan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan dukungannya dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Teman- teman KPM Indo Sondo, Adi, Aqsar, Nurul, Mita, Awaliya, Camma, Erni, Syaifullah, Jum, Aini, Nurmi, Wana yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberi dukungan, bantuan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
8. Terima kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu peulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga

skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dapat bermanfaat sebagai referensi bacaan bagi orang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamin ya rabbal' alamin

Parepare, 25 Desember 2021
3 Rabiul Akhir 1443

Penulis


Nurhayati
17.2900.062



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhayati
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.062
Tempat/Tgl Lahir : Tuppu, 11-06-1997
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan plagiat atas keseluruhan skripsi, kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Desember 2021
3 Rabiul Akhir 1443

Penulis


Nurhayati
17.2900.062

ABSTRAK

Nurhayati. *Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Damirah)

Efektivitas merupakan ukuran ketercapain sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu). Dalam persamaan, efektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan pengertian efektivitas tersebut dapat diliat bahwa sekolah dapat dikata efektif apabila sekolah tersebut mampu mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan merujuk pada pendekatan penelitian lapangan (*field research*) instrument pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu menggunakan analisis kualitatif; pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare telah sesuai pada aturan juknis, dengan alokasi uraian pengelolaan dana BOS telah dianggap sesuai dengan aturan juknis dan pengalokasian anggaran telah mengacu pada sub anggaran yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Realisasi penggunaan dana biaya operasional sekolah pada tahun 2019, telah memenuhi aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dana BOS yang dilakukan dengan dilakukan dengan empat tahap pengalokasian dana. Sedangkan evaluasi manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah telah tercapai sesuai dengan manajemen keuangan, ketiga sub anggaran telah tercapai sesuai dengan indikator efektifitas manajemen keuangan ditinjau dari aspek transparansi yaitu adanya keterbukaan dengan melakukan transparan pada manajemen keuangannya.

Kata Kunci: *Efektivitas Pengelolaan Dana, Biaya Operasional Sekolah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Peneliti Relevan	8
B. Tinjauan Teoriti.....	11
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
B. Perencanaan Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare	47
C. Realisasi Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.....	56
D. Evaluasi Manajemen Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare ..	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Identitas Sekolah UPTD SD 84 Parepare	42
4.2	Anggaran Biaya Operasional Sekolah 2019	53
4.3	Realisasi Dana Biaya Operasional Sekolah 2019	57



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran Lampiran
1	Instrumen Penelitian
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Rencana Anggaran UPTD SD 84 Parepare 2019
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Izin Penelitian
6	Surat Rekomendasi Penelitian
7	Surat Keterangan Selesai Penelitian
8	Biodata penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan, baik secara formal melalui sekolah maupun secara informal dari pendidikan di dalam rumah dan masyarakat. Pendidikan menurut Herman Horn adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.¹

Konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait didalamnya. Seperti dikemukakan Thomas John yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai Lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan. Oleh karena hal itu merupakan administrasi/manajemen bisnis Lembaga pendidikan. Selanjutnya beliau menjelaskan tiga hal penting, yaitu ilmu ekonomi yang berkait dengan alokasi dan pembiayaan yang berkait dengan distribusi,

¹Amin Kueife Elfachmi, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Gelorah Aksara Pratama, 2016).

tetapi yang ketiga terkait dengan manajemen yang di dalamnya mencakup fungsi dari komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi.²

Model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar yang dibangun berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana memanfaatkan dana pendidikan dengan efisien agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik sehingga proses pendidikan di daerah berjalan efektif dalam memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik secara merata dan adil.³ Paling tidak ada tiga persoalan pokok dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu (1) *financing*, menyangkut dari mana sumber pembiayaan diperoleh, (2) *budgeting*, bagaimana dana pendidikan dialokasikan, dan (3) *accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan.

Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan terutama tingkat menengah, sebab untuk pendidikan dasar, berkenaan dengan adanya Wajib Belajar, semestinya pembiayaan dijamin pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan.

Biaya sekolah-sekolah yang berstatus negeri, sumber dana sekolah terbagi menjadi dua bagian, yaitu (1) dana dari pemerintah, yang umumnya terdiri dari dana srutin, meliputi gaji serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas, dan (2) dana dari masyarakat, yang sekarang melalui komite sekolah, ada yang di gali dari

²Nanang Fattah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2017).

³Akdon Dedy Achmad Kurniady Deni. Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2017).

orang tua siswa maupun sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha, dan bahkan ada beberapa sekolah yang mampu membangun *networking* cukup bagus sehingga mendapatkan pembiayaan pendidikan yang cukup besar.

Dilihat dari segi penggunaan, sumber dana dapat dibagi menjadi (1) anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji, biaya operasional keseharian sekolah, dan (2) anggaran untuk pengembang sekolah. Lahirnya UU Otonomi Daerah (UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004) yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya, mempunyai dampak yang besar bagi sistem manajemen pembiayaan pendidikan. Sumber anggaran pendidikan menjadi semakin kompleks, sistem pengalokasiannya juga melalui berbagai jalur sehingga pengelolaan penggunaannya sampai kepada pertanggungjawabannya menjadi semakin kompleks. Sistem pengelolaan pembiayaan pendidikan dipusat, provinsi, kabupaten/kota juga sangat berbeda karena wewenang dan perolehan anggarannya juga berbeda.⁴

Keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Di antara masalah-masalah tersebut antara lain, penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri (korupsi), membebankan kepada siswa didik, pelaporan keuangan yang penuh manipulasi, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna, dan lain sebagainya. Masalah-masalah tersebut harus mendapatkan perhatian, khususnya dari pemerintah dan komite sekolah.

⁴Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini merupakan kegiatan manajemen keuangan yang mengatur penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang program pengajaran.⁵ Namun demikian untuk mencapai mutu suatu pendidikan tertentu di perlukan suatu manajemen kinerja yang diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan masyarakat dan pemerintah dapat di capai melalui serangkaian kegiatan yang mengarah kepada sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang diharapkan merupakan titik awal dalam perencanaan efektivitas pengelolaan dana biaya operasional sekolah sebagaimana yang terjadi saat ini banyak kegiatan pendanaan sekolah yang dilakukan tanpa melihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip manajemen keuangan Syariah.⁶ Manajemen keuangan Syariah sangat berpengaruh bagi masyarakat karena dengan produk syariah lebih aman dan nyaman karena manajemen keuangan syariah lebih menyentuh sektor real.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, berapa guru dan siswa yang merupakan objek langsung dan dengan mengobservasi gambaran “Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”.

⁵Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Rosda Karya 2006)

⁶Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: CT Pustaka Setia 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang menarik untuk mengkaji efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (analisis manajemen keuangan syariah) dilihat dari hal-hal berikut:

1. Bagaimana perencanaan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare?
2. Bagaimana realisasi dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare?
3. Bagaimana evaluasi manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.
2. Untuk mengetahui realisasi dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.
3. Untuk mengetahui evaluasi manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi menulis
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah pada sekolah di UPTD SD 84 Parepare.

2. Bagi sekolah

Sebagai masukan yang bersifat positif untuk digunakan sebagai koreksi terhadap kebijakan yang telah ditentukan guna terciptanya laporan pertanggungjawaban mengenai keuangan sekolah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pankrasia Renya Rosari “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Program Studi Strata Satu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 2019”. Penelitian ini berfokus pada implemmentasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, serta untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi proses pengelolaan BOS di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi juga sudah dilaksanakan secara baik. Beberapa indikator Akuntabilitas baik dalam bentuk akuntabilitas kepemimpinan, proses, program dan kebijakan dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur. Sedangkan dilihat dari sisi transparansi yang dampak dari indikator ketersediaan akses informasi, memadai tidaknya publikasi dan pemaparan RKAS, pengelolaan dandokumen pelaporan BOS telah sangat baik dilaksanakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada focus penelitian dimana peneliti terdahulu pengelolaan dana BOS sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti terdahulu melakukan penelitian di SDN Kepatihan 3 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Mellani “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Pada SMA Aisyiyah 1 Palembang Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi

dan Bisnis 2016”. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau (BOS) sudah efektif dalam rangka penyajian laporan pertanggung jawaban pada sekolah SMA Aisyiyah 1 Palembang sudah sesuai dengan ketentuan. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban, sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakan pencatatan terhadap penerima dan pengeluaran uang ke buku-buku pembantu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan karena adanya kesalahan dalam pengetikan angka nominal.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitiannya.

Syamsir “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kula Kab. Sidrap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 2014”. Penelitian ini berfokus pada gambaran pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kula Kab. Sidrap. Kesimpulan dari skripsi yaitu efektivitas pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri Panca Rijang Kec. Kulo Kab. Sidrap digunakan untuk pembelian buku pelajaran, pembiayaan penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan kesiswaan, pembiayaan proses belajar mengajar, pembiayaan langganan daya dan jasa, biaya perawatan ringan, pengembangan kompetensi guru, honorarium guru honor, pembelian alat dan media pembelajaran dan fasilitas lain yang menunjang proses pembelajaran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kula Kab. Sidrap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 2014

Al Maruf “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima)”.⁷ Hasil penelitiannya Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) SDN 44 Mande Kota Bima dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (JUKNIS BOS), (2) Faktor Pendukung, Adapun factor pendukung dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah sebagai berikut: (a) Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan, (b) Terjalannya bentuk kerjasama yang baik dari pihak pengelola dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota bima), (c) Motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, (d) Dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan tenaga. Sedangkan, Faktor penghambat, Adapun factor penghambat dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu: (a) Waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, (b)

⁷Al Maruf “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima), 2019

Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, (c) Sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan (d) Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima).

B. Tinjauan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Beni Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah di tentukan.⁸

Memaknai efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang, dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut di akui oleh Chung dan Maginson, “*efektivitas means different poelpe.*” Dalam kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),

⁸Bab II Kajian Kepustakaan, Landasan Teori Efektifitas. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.umpalembang.ac.id/id/erprint/3454/2/222015153_BAB%2520II_SAMPAI%2520BAB%2520TERAKHIR.pdf&ved=2ahUKEwjN9tDmmKDxAhVw8XMBHeRIC4YQFjABegQIBBAG&usg=AOvVaw38AjfvXthoew-wFw_CkeCx (diakses pada 12 januari 2022).

manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat di kemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Dengan demikian, efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah.

Thomas melihat efektivitas pendidikan dalam kaitannya dengan produktivitas, berdasarkan tiga dimensi berikut ini:

Pertama, *The administrator production function*; fungsi ini meninjau produktivitas sekolah dari segi keluaran administratif, yaitu seberapa besar dan baik layanan yang dapat diberikan dalam suatu proses pendidikan, baik oleh guru, kepala sekolah, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Kedua, *The psychologist's production function*; fungsi ini melihat produktivitas dari segi keluaran, perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik, dengan melihat nilai-nilai yang di peroleh peserta didik sebagai suatu gambaran dari prestasi akademik yang telah dicapainya dalam periode belajar tertentu di sekolah.

Ketiga, *The economic's production function*; fungsi ini melihat produktivitas sekolah ditinjau dari segi keluaran ekonomi yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan sekolah. Hal ini mencakup “harga” layanan yang

diberikan (pengorbanan atau *cost*) dan “perolehan” (*earning*) yang ditimbulkan oleh layanan itu atau di sebut “peningkatan nilai baik”.⁹

Berdasarkan berbagai pendapat tentang keefektifan sekolah, tampaknya persoalan mutu masih dipersepsi secara berbeda oleh para pakar, bergantung sudut pandang dan bidang ilmu yang di pakai untuk mengkajinya. Namun demikian salah satu indikator penting tujuan pendidikan yang banyak disepakati adalah tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran yang berupa prestasi belajar siswa yang di gunakan sebagai indikator untuk mengukur keefektifan sekolah.¹⁰

a. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hal yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebagai sebuah kebutuhan.¹¹ Kedudukan perencanaan pendidikan sama dengan kedudukan perencanaan pembangunan ekonomi, atau perencanaan pembangunan sektor pembangunan lainnya. Keterpaduan pola pikir yang diterangkan dalam perencanaan ini menerapkan konsep *General Sytems Theory* yang memandang upaya pembangunan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang dalam hal ini berbagai sektor pembangunan. Pembangunan setiap sektor harus terpadu dan

⁹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007)

¹⁰ Anwar Sewang, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Wineka Media Belajar Sepanjang Hayat 2015)

¹¹ Didin Hafidhuddin Hendri Tanjung, *Manajemene Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insasi Press 2003)

saling mempunyai keterkaitan erat hingga sumber-sumber daya yang di pergunakan dapat secara optimal diatur dalam pemanfaatannya hingga efektif.¹²

Konsepsi keefektifan pendidikan (*educational effectiveness*) menawarkan harapan bahwa desentralisasi atau pengelolaan sekolah berbasis MBS akan mendorong peningkatan prestasi belajar siswa. Penganjur konsep ini berharap hal tersebut akan terjadi melalui kurikulum yang fleksibel (*flexible curriculum offerings*) yang ditawarkan (*tailored*) kepada siswa disekolah-sekolah tertentu.¹³

Perencanaan adalah menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman, menentukan strategi, kebijakan taktik dan program. Semua itu dilakukan berdasarkan proses pengambilan keputusan secara ilmiah.

Arti penting perencanaan yaitu memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Terdapat sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan:¹⁴

- 1) Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan
- 2) Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama
- 3) Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran
- 4) Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat
- 5) Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi

¹²Udin Syaefudin Sa'ud Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rodakarya 2014)

¹³Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2015).

¹⁴Mahmud, *Administrasi Pendidikan Menuju sekolah efektif*, (Makassar , Aksara Timur. 2015).

- 6) Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi
- 7) Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami;
- 8) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti;
- 9) Menghemat waktu, usaha dan Dana.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah sebuah panduan untuk mempersiapkan keputusan bagi kegiatan masa depan yang mengarah kepada tujuan berdasarkan komitmen - komitmen tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan sekolah adalah tuntunan-tuntunan, taksiran, pos-pos tujuan, dan letak-letak pedoman yang telah jadi komitmen dan pernyataan keputusan yang tidak dapat ditarik kembali, yang diatur dan disepakati secara bersama-sama oleh kepala sekolah dan staff personnel sekolah, berdasarkan periode waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam - macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang – orang pada setiap aktivitas ini. Menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. hubungan dan struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis, staf, dan fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang.

Pengorganisasian meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan organisasi. Dalam pengorganisasian bukan hanya

mengidentifikasi jabatan dan menentukan hubungan, namun yang paling penting adalah mempertimbangkan orang-orangnya dengan memperhatikan kebutuhannya agar berfungsi dengan baik. Koontz mengemukakan pengorganisasian adalah penetapan struktur peranan internal dalam suatu lembaga yang terorganisasi secara formal. Oleh karena itu pengorganisasian yang efektif dapat membagi habis (merata) dan menstrukturkan tugas-tugas kedalam sub-sub komponen organisasi.

Keefektifan dalam pengorganisasian sekolah menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, tanggung jawab, hubungan kerja bagian-bagian organisasi, dan menentukan personel (guru dan non guru) melaksanakan tugasnya. Sedangkan keunggulan dalam pengorganisasian menggambarkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah.

Adapun langkah – langkah pengorganisasian adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami tujuan institusional.
- 2) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan institusional.
- 3) Kegiatan yang serumpun (sejenis) dikelompokkan dalam satu unit kerja.
- 4) Menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja.
- 5) Menetapkan personal (jumlah dan kualifikasinya) setiap unit kerja.
- 6) Menentukan hubungan kerja antarunit kerja.

Setelah pengorganisasian, kemudian penjelasan terkait dengan kepemimpinan, Kepemimpinan berfungsi menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain melaksanakan

tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama.

Berdasarkan fungsi kepemimpinan yang menggambarkan cara sebagai manajer dalam melaksanakan tugas maka penulis menyimpulkan bahwa sebagai manajer harus mampu dalam mengelola tugas serta mampu mengatur bawahan sesuai dengan fungsi manajer memiliki tanggung jawab penuh untuk menentukan serta mengarahkan bawahannya.

Selain pengorganisasian, maka pengawasan adalah penentuan standar, supervise, dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.

Pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat mempermudah pengawasan, baik dalam mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan keuangan maupun penindakan terhadap penyimpangan. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah dan secara eksternal oleh badan lain yang ditentukan oleh pemerintah yaitu berupa berita acara. Berdasarkan beberapa fungsi manajemen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen yang paling utama adalah Planning, Organizing, Leading dan Controlling. Seorang manajer dituntut untuk mampu menjalankan keempat fungsi ini dengan baik agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Keempat fungsi ini merupakan rangkaian dari seluruh proses pelaksanaan dalam manajemen yang saling berkaitan.

Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Manajer yang efektif adalah manajer

yang memilih pekerjaan yang benar untuk dijalankan. Bagi manajer, dalam setiap operasinya membutuhkan prestasi yang efisien dan efektif.¹⁵

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi adalah:

a. Waktu

Ketetapan waktu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan sektor utama. Semakin lama tugas yang dibebankan itu dikerjakan maka semakin banyak tingkat efektivitas kerja karena menambah waktu tidak sedikit.

b. Tugas

Bawahan harus diberikan maksimal dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan karyawan.

c. Motivasi

Manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi karyawan untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

¹⁵Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2014).

d. Produktivitas

Seorang karyawan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik demikian pula sebaliknya.

e. Pengawasan

Adanya pengawasan kinerja karyawan dapat terus terpantau dan dapat memperkecil risiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

f. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang. Cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang karyawan sewaktu bekerja.

g. Fasilitas

Adalah suatu sarana dan peralatan yang di sediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Semakin baik sarana yang mempengaruhi konsentrasi seorang karyawan sewaktu kerja.¹⁶

2. Pengelolaan Dana

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Sekolah

Firman Allah swt dalam Q.S. Surah Al-Furqan/25: 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaran itu) di tengah-tengah antara yang demikian.¹⁷

¹⁶Mellani “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Pada SMA Aisyiyah 1 Palembang*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Palembang, 2016).

¹⁷Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Bandung: Cordoba,2015),

Ayat ini mengandung pengertian bahwa manajemen keuangan secara islam merupakan suatu proses pengelolaan keuangan Lembaga pendidikan islam secara islam dengan cara mengelola keuangan yang baik secara efektif dan efisien.¹⁸

Negara Republik Indonesia pengelolaan keuangan ditetapkan dalam satu undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. APBN merupakan perintah kepada pelaksana, pedoman, batas dan sekaligus program kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas negara di segala bidang.

Pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas APBN dengan menekankan segi operasionalnya. Komponen APBN terdiri atas Anggaran Rutin (pendapatan dan belanja rutin), dan Anggaran Pembangunan (penerimaan dan belanja pembangunan).¹⁹

Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan terciptanya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, Lipham (1985) mengemukakan tiga cara sudut pandang, yaitu:

¹⁸Qorry Aini “*Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Al-Misbah)*” (Skirip Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang 2018)

¹⁹ Soebagio Atmodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Ardadizya Jaya 2000)

- 1) *Comparative approach*, penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap mata anggaran untuk setiap tahun.
- 2) *The Planning Programming Budgeting Evaluation System*, (PPBES), penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sarana program secara khusus dan umum.
- 3) *Functional Approach*, penganggaran dalam bentuk gabungan antaraj unsur PPBES dengan *Comparative approach*.

Rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan efektif mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sumber keuangan dan pembiayaan suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, uang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, orang tua atau peserta didik dan masyarakat, baik mengikat atau tidak mengikat.

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orangtua atau masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung

jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Sementara dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.²⁰

b. Unsur – Unsur Pengelolaan Dana Sekolah

Konsep manajemen pendidikan mengandung unsur - unsur fleksibel, efektif, efisien, terbuka, kooperatif dan partisipatif:

1) Fleksibel

Fleksibel yang dimaksud adalah tidak kaku Menurut pendapat Dr. Imam Suprayogo bahwa berdasarkan hasil pengamatan beliau walaupun sifatnya masih terbatas, menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah meraih prestasi unggul justru fleksibilitas pengelolaannya dalam menjalankan tugas – tugasnya.

Selanjutnya memberikan penjelasan jika diperlukan maka pengelola berani mengambil kebijakan atau memutuskan hal - hal yang berbeda dengan petunjuk formal dari atasan. Oleh karena itu untuk menghidupkan kreativitas para pengelola lembaga pendidikan maka perlu dikembangkan evaluasi yang tidak seolah – olah hanya berorientasi pada proses melainkan dapat dimengerti pada sesuatu yang akan dicapai. Jika pandangan ini dipahami maka manajemen dalam hal ini pemanfaatan dana Bantuan operasional sekolah kinerja kepala pendidikan tidak hanya diukur dengan menggunakan program yang ada. sejauh mana pelaksanaan itu melahirkan hasil - hasil yang telah diinginkan dari berbagai pihak.

2) Terbuka

Terbuka disini bukan hanya bermaksud terbuka dan memberikan suatu informasi melainkan juga bisa menerima saran/ pendapat orang lain, membuka

²⁰Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jl. Anggrek 126 sambilegi, maguwoharjo, Depok, Slema, Jogjakarta: ar-ruzz media group 2010).

kesempatan kepada semua pihak, terutama staff yang akan mengembangkandiri sesuai dengan kemampuan baik dalam jabatan maupun bidang lainnya.

Pernyataan di atas dijelaskan bahwa kepala sekolah mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi keefektifan sekolah melalui kepemimpinan dan interaksi mereka serta sekolah yang berhasil mengadakan rapat secara rutin. Kepala sekolah juga mampu menerima dan meminta saran dari staf sekolah dan tidak sepenuhnya melakukan pekerjaannya sendiri. Sedangkan menurut Melayu Hasibuan dalam manajemen terbuka sebelum mengambil suatu keputusan terlebih dahulumemberikan kesempatan kepada guru dan staf memberikan saran.

Berdasarkan tugas sebagai manajer di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang manajer harus mampu mengelola dan membawahi bawahannya untuk menumbuhkan nilai tanggung jawab pada bawahan. Sebagai bawahan yang memiliki atasan harus mampu berpikir inovatif dalam mengembangkan mutu dan kualitas perusahaan atau kualitas sissa di sekolah.

3) Koperatif dan Partisipatif

Melaksanakan tugas manajer pendidikan harus kooperatif dan partisipatif. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang mengakibatkan mengapa manajemen pendidikan harus bersifat kooperatif dan partisipatif karena disebabkan tidak bisanya melepaskan diri dari beberapa limitasi (keterbatasan). Agar tujuan manajemen pendidikan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan adanya manajer yang handal dan mampu membuat perencanaan yang baik, mengorganisir, menggerakkan dan melakukan control serta tahu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan dancaman (*threat*). Maka seseorang yang

diberi amanat untuk menjadi seorang pemimpin lembaga pendidikan hendaknya sesuai dengan porsinya dan tanggung jawabnya.

c. Penyusunan Anggaran Keuangan Sekolah

Proses perencanaan anggaran disekolah, sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana pula. Format yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi, sumber pendapatan (dana rutin, DPP, DBO, OPF, dan BP3) dan pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran serta honorarium dan kesejahteraan.

Kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipham mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

Pertama, merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost-affectivenes*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.

Kedua, mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sarana program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.

Ketiga, mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, memmbuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Keempat, menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sarana program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Banyak faktor yang memengaruhi proses penyusunan anggaran pendidikan di sekolah, seperti perkembangan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar mengajar.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam perencanaan keuangan sekolah atau anggaran belanja sekolah menurut Morphet sebagai berikut: Pertama, mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Kedua, melakukan perbaikan terhadap peraturan dan *input* lain yang relevan dengan merancang pengembangan sisten secara efektif. Ketiga, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses dan hasil secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.²¹

d. Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)

Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional tampaknya memadukan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Dalam hal ini ada beberapa anggaran yang lebih ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah

²¹Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jl. Anggrek 126 sambilegi, maguwoharjo, depok, slema, Jogjakarta: ar-ruzz media group 2010).

tidak dapat mengubah dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya. Sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembangan. Dengan demikian, pola pengelolaan anggaran belanja sekolah, terbatas pada pengelolaan tingkat operasional.

Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah adanya pencarian tambahan dan dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya, secara pengelolaannya di padukan sesuai dengan tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat MBS, sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan yang sangat lebar dalam kaitannya dengan pengelolaan dana untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan sekolah. Agar dapat mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah.

Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melainkan melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud dari pendidikan dan program. Berdasarkan perpektif tersebut, pembuatan anggaran belanja dapat membuka jalan bagi pembangunan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan merancang cara-cara bagi pencapaiannya.

Berdasarkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur, diantaranya:

Pertama, kepala sekolah dibantu para wakilnya yang di tetapkan oleh kebijakan sekolah. Kedua, orang tua murid sebagai Komite Sekolah. Ketiga, dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Keempat, pemerintah kota/kabupaten setempat. Semua komponen

ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan operasional sekolah sesuai kedudukan dan kapasitasnya.²²

3. Biaya Operasional Sekolah

a. Pengertian Biaya Operasional sekolah

Biaya pendidikan akan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan meliputi sarana dan prasarana, dan biaya satuan menurut pendekatan sistem, biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, kegiatan tersebut disebut efisien dan efektif.²³

Mengenai biaya operasional itu untuk kegiatan-kegiatan sekolah, misal untuk guru honor, membayar guru honor, terus untuk kegiatan, misal anak-anak yang benar-benar membutuhkan, misal mereka itu jarak jauh membutuhkan transportasi, kita memberikan transportasi. Dan mereka yang benar-benar tidak mampu membeli buku kita belikan buku dari dana tersebut.²⁴

Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan pembiayaan, sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi seperti halnya Lembaga-lembaga pendidikan dan Lembaga-lembaga yang lain. Itulah sebabnya setiap awal tahun bapak presiden

²²Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Jl. Anggrek 126 sambilegi, maguwoharjo, depok, slema, Jogjakarta: ar-ruzz media group 2010).

²³Moch. Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2013).

²⁴Hilda Ong Tjun Lian. "Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Studi Lapangan Tahun Ajaran 2005-2006)", (*Jurnal Perkotaan Desember 2012 Vol. 4. No.2*).

sebagai kepala negara telah mengajukan rencana pendapatan dan belanja negara di depan anggota DPR sebagai wakil rakyat Indonesia untuk pembiayaan tahun anggaran yang akan datang.²⁵

b. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Penyelenggaran pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah Bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu didasari maupun tidak didasari.

Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagi

²⁵Suharsimi Arikunto Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2009)

sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini.²⁶

c. Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan tidak pernah tetap akan tetapi selalu berkembang dari tahun ke tahun. Secara garis besar perubahan pembiayaan ini di pengaruhi oleh dua hal yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal.

1) Faktor Eksternal,

faktor yang ada diluar sistem pendidikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Berkembangan Demokrasi Pendidikan

Dahulu banyak negara yang masih dijajah oleh bangsa lain yang tidak memperbolehkan penduduknya untuk menikmati pendidikan. Dengan lepasnya bangsa itu dari cengkraman penjajah, terlepas pula kekangan ats keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia Demokrasi Pendidikan di rumuskan dengan jelas dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 10 dan ayat 2 konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu.

b) Kebijakanaksanaan Pemerintah

Pemberian hak kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Namun demikian, agar tujuan itu tercapai pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang bersifat meringankan dan menunjang pendidikan misalnya: Pertama, pemberian pembiayaan yang besar bagi

²⁶Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offsey 2004).

pendiri Gedung dan kelengkapannya. Kedua, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan pemungutan serta beasiswa. Dan ketiga, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya.

c) Tuntunan akan Pendidikan

Kenaikan tuntunan akan pendidikan terjadi dimana-mana. Di dalam negeri tuntunan akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dan segi kualitas yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

d) Adanya Inflasi

Inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik mengikut kenaikan inflasi.

2. Faktor Internal

Faktor yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor tersebut antara lain:

a) Tujuan Pendidikan

Salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan intitusional suara Lembaga pendidikan.

b) Pendekatan yang digunakan

Strategi belajar mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan metode lain dan pendekatan secara individual.

c) Materi yang disajikan

Materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian teori.

d) Tingkat dan Jenis Pendidikan

Dua dimensi yang berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah tingkat dan jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang di ajarkan, banyak guru yang terlibat sekaligus kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya, biaya pendidikan di Sekolah Dasar akan jauh berbeda dengan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi, apalagi bagi jurusan yang banyak memerlukan praktek.²⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Dalam persamaan efektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang di diharapkan. Berdasarkan pengertian efektivitas di atas dapat di liat bahwa sekolah dapat di kata efektif apabila di mampu mencapai sasaran/tujuan tertentu.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan

²⁷Suharsimi Arikunto Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2009)

organisasi yang telah ditentukan.²⁸ Dimana dana yang dikeluarkan harus transparan dalam hal-hal pembiayaan seperti pengalokasian dana.

3. Biaya Operasional Sekolah

Biaya operasional pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah).²⁹ Biaya operasional sekolah di kata efektif apabila biaya-biaya di gunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tidak merugikan sekolah.

4. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan sering didefinisikan sebagai cara merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari dan menyimpan dana atau uang bagi sebuah lembaga atau perusahaan. Sedangkan keuangan islam adalah sistem keuangan sesuai dengan hukum islam (yang di sebut syariah). Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum islam (prinsip islam).³⁰

Manajemen keuangan sekolah sering kali mengalami kendala misalnya pelaporan pertanggungjawaban jadi bisa dikata bahwa manajemen sekolah terus tidak

²⁸Syamsir, “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Smp Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kab.Sidrap” (Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 2014)

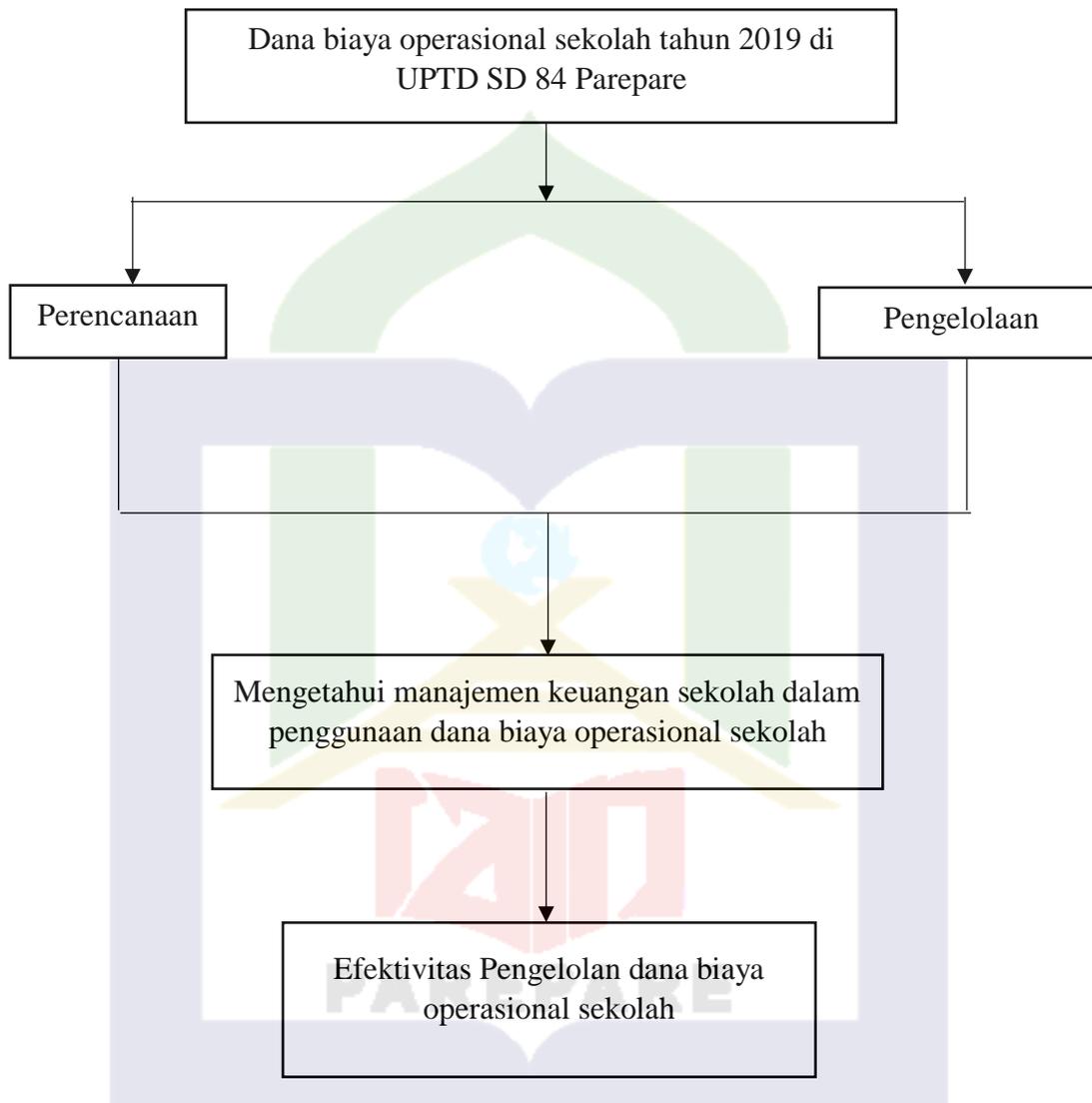
²⁹Muhammad Imad, Hamdan Herdiawan, “Peran Biaya Operasional Pendidikan Terhadap Auput Pendidikan” (*Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan Agustus 2019 Vol. 1 No. 2*)

³⁰Hasan Sultoni “Evolusi Manajemen Keuangan Syariah: Perkembangan Pada Zaman Rasulullah Sampai Sekarang” ,(*Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam 2017 Vol. 4. No.1*).

efektif. Namun ketika kita berdasarkan apa manajemen keuangan sekolah yang berbasis syariah itu bisa menjamin bahwa pelaporan keuangan tidak mengalami kendala karena dengan berbasis syariah berarti kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai islam dalam pelaporan pertanggungjawaban.



D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.³¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari fokus kajian penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami yang sifatnya mendasar dan naturalisasi atau dengan kata lain bersifat kealamian.

Penelitian ini berguna untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai efektivitas pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti perangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah yang utuh sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*).

Field research penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan pada suatu fenomena dalam variabel tunggal maupun kolerasi atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu

³¹Muhammad Kamal Zubair, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2020).

peristiwa maupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³²

Penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh penelitian yang berkaitan mengenai efektivitas pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yaitu di UPTD SD 84 Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 1 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian), penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah (pendidikan).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa melalui media perantara. Data ini dapat berupa opini objek (orang)

³²Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2014).

secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kegiatan, atau kejadian dari hasil pengujian.³³ Untuk mendapatkan data primer ini peneliti akan berkomunikasi langsung dengan pengawai yang menjabat sebagai kepala sekolah, bendahara di UPTD SD 84 Parepare yang sesuai dengan pertanyaan dengan “efektivitas pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).”

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut merupakan tambahan yang berasal dari sumber tertulis. Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari dokumen ataupun arsip program dari kegiatan guru maupun foto-foto yang mampu memberikan deskripsi mengenai “efektivitas pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).”

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa persiapan sebagai tahap awal dimana peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan teknik dan instrument pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

³³Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV.Citra Media 2003)

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.³⁴ Data yang diperoleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya mengenai efektivitas pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁵ Adapun yang diwawancarai yaitu pegawai yang menjabat sebagai bendahara di UPTD SD 84 Parepare.

3. Dokumentasi

Dakumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan perlengkap dari penggunaan metode observasi dan hasil wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat di percaya jika didukung oleh dokumen. Teknik dokumentasi

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta 2019).

³⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2016).

digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)”.

1. Keterpercayaan (*Credibility validitas internal*)

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur.

Kredibilitas (*Credibility*) adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan peneliti dengan hasil penelitian.

2. Keteralihan (*Transferability validitas eksternal*)

Uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif selain dilakukan pada internal penelitian juga keterpakaianya oleh pihak eksternal. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal ini, Nasution mengatakan bahwa, “Bagi penelitian kualitatif, transferabilitas tergantung pada sipemakai yakin, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam

³⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2016).

konteks dalam situasi tertentu. Karena itu, transferabilitas hasil penelitian ini diserahkan kepada pemakainnya.

3. Kebergantungan (*Dependability reabilitas*)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direfleksikan. Dalam hal reliabilitas, Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif akan menemukan kesulitan untuk merefleksikan pada situasi yang sama karena setting sosial senantiasa berubah dan berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan informasi sebagai sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak.

4. Kepastian (*Confirmability objektivitas*)

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informasinya jelas. Komfirmabilitas berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.³⁷

³⁷Djam'an Satori Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data mengenai alat analisis apa saja yang digunakan dalam penelitian, tergantung apa tujuan penelitian tersebut. Dalam proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Melakukan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal pertama yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk tujuan agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan.³⁸ Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Setelah penelitian melakukan pengumpulan data yang harus dilakukan adalah reduksi data agar peneliti hanya mengambil data yang benar-benar di perlukan.

3. Penyajian Data

Alur yang penting dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling

³⁸ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

sering digunakan dalam data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Data yang telah dikumpulkan peneliti selanjutnya akan memaparkan berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan selama meneliti.

4. Membuat Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan ketiga yang penting dalam analisis data. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, dan penarikan kesimpulan.³⁹ Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, dan pengalaman peneliti.

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di salah satu sekolah dasar Kota Parepare, peneliti mendeskripsikan beberapa identitas terkait lokasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Gambaran umum UPTD SD 84 Parepare

IDENTITAS SEKOLAH		
1	Nama Sekolah	: UPTD SD NEGERI 84 PAREPARE
2	NPSN	: 40307644
3	Jenjang Pendidikan	: SD
4	Status Sekolah	: Negeri
5	Alamat Sekolah	: Jl. Beringin A 14 A
	RT / RW	: 4/5
	Kode Pos	: 91121
	Kelurahan	: Bumi Harapan
	Kecamatan	: Kec. Bacukiki Barat
	Kabupaten/Kota	: Kota Parepare
	Provinsi	: Sulawesi Selatan
	Negara	: Indonesia
6	SK Pendirian Sekolah	: 5091/B/III/SKKP/1956
7	Tanggal SK Pendirian	: 20.18.03.08.00506
8	Status Kepemilikan	: Belum Bersertifikat
9	SK Izin Operasional	: 421/1591.1/Dispend/XII/2016
10	Tgl SK Izin Operasional	: 1985-01-01

Lanjutan halaman 44

Sumber data lanjutan halaman 43

IDENTITAS SEKOLAH		
11	Kebutuhan Khusus Dilayani	:
12	Nomor Telepon	: -
13	Nomor Fax	: -
14	Email	: sdn84.parepare@gmail.com
15	Website	: http://sdn84.parepare.com
16	Kepala Sekolah	:
17	Operator Pendataan	:
18	Akreditasi	:
19	Kurikulum	:

Sumber data: UPTD SD 84 Parepare 2019

Tabel diatas menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, terdapat beberapa keunggulan terkait dengan lokasi penelitian diantaranya yaitu hadirnya Website UPTD SD 84 Parepare secara resmi. Websine tersebut diharapkan dapat bermanfaat dengan maksimal sesuai peruntukannya. Informasi berkenaan dengan UPTD SD 84 Parepare akan dipublish secara terbuka pada website sekolah ini. Semua orang tidak hanya warga UPTD SD 84 Parepare yang dapat mengakses, namun semua orang. Website ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik kepada sekolah sertaarganya. Website akan dikelola dengan sebaik mungkin sehingga apapun yang akan diketahui tentang sekolah ini tersedia. Saya selaku kepala UPTD SD 84 Parepare akan berusaha memotivasi warga sekolah, khususnya guru sehingga berkontribusi terhadap website ini.

Peneliti telah menjelaskan terkait dengan hasil penelitian dilapangan sebagai suatu kewajiban mahasiswa dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara serta mengambil beberapa dokumen terkait diantaranya yaitu: dokumen profil sekolah, Rencana kerja anggaran sekolah, serta akumulasi dana anggaran sekolah per tahapan anggaran. Pada penelitian ini, peneliti mengfokuskan pada manajemen keuangan yang merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan atau pengendalian.

Kegiatan-kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan Dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan Dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Peran seorang kepala sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan sekolah untuk mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan dan memimpin Administrasi

Anggaran/Biaya Pendidikan di Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan pada dasarnya untuk para pengelola pendidikan, khususnya para kepala sekolah dapat dengan mudah menguasai bidang tugasnya dan dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengarahkan sekolah yang dipimpinnya. Administrasi Pendidikan mengandung arti administrasi dalam arti luas yang bermakna “pengelolaan atau manajemen”, dimana didalamnya terkandung administrasi dalam arti sempit yaitu pekerjaan tulis menulis, seperti pendaftaran peserta didik/siswa baru, mengisi buku induk, mengisi buku rapor, membuat laporan keuangan, dan sebagainya.

Peneliti juga membahas terkait dengan tujuan Administrasi Pendidikan adalah memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan, sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat dari beberapa kegiatan Administrasi Pendidikan, kegiatan yang menjadi salah satu unsur penting adalah Administrasi Anggaran/Biaya Pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan.

Penulis membagi penjelasan pada hasil penelitian ini menjadi beberapa sub penjelasan merujuk pada rumusan masalah yang telah dibahas pada Sub BAB I terdahulu. Peneliti melakukan beberapa wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara sebagai penanggung jawab terbesar atas seluruh pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

B. Perencanaan Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.

Berdasarkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun.

Bantuan Operasional Sekolah merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Fungsi uang atau dana didalam organisasi sekolah diantaranya sebagai penunjang lancarnya kegiatan utama, yaitu melakukan proses pendidikan dan pengajaran. Lebih-lebih dalam era persaingan seperti sekarang ini, perubahan dan

inovasi menjadi suatu tuntutan. Maka bisa dimengerti bahwa betapa pentingnya dana dan biaya dalam suatu pendidikan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan manajemen keuangan yang baik sesuai dengan aturan juknis yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai sistem manajemen pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada UPTD SD 84 Parepare. Maka hasil data yang telah didapatkan dilapangan dipaparkan bahwa hasil observasi terkait dengan aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dana bos di antaranya yaitu:

1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan – bahan habis Pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer.

Berdasarkan data diatas maka tentunya dipandang sangat penting dalam Pembelian setiap pembiayaan terkait dengan dana operasional sekolah haruslah melalui rapat internal dalam sekolah yang kemudian dilaporkan ke pihak pengawas Dana operasional sekolah.

Jadi pemanfaatan bantuan operasional sekolah bisa dikatakan bahwa segala komponen tersebut harus mengikuti juknis penggunaan dana Bos yang bersifat pengembangan sekolah dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, inilah yang menjadi dasar pengeluaran anggaran ⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap rencana anggaran pengelolaan haruslah sesuai dengan juknis penggunaan dana, sehingga pihak sekolah tidak serta merta dapat untuk menggunakan anggaran diluar ketentuan juknisnya. Jika kemudian peneliti merujuk pada beberapa sasaran penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang diturunkan dimana beberapa sasaran tersebut merujuk pada besaran sebagai berikut:

1. SD/MI/SDLB/ Salafiah/ sekolah agama non Islam setara SD sebesarRp. 254.000,- /siswa/tahun.
2. SMP/MTs/SMPLB/SMPT/Salafih/sekolah agaama non Islam setaraSMP sebesar Rp. 354.000,- / siswa / tahun

Sejak tahun 2010 besar biaya satuan BOS yang diterimaoleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPTdikota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten: Rp 570.000,-/siswa/tahun.⁴¹

Mengkaji setiap alokasi anggaran yang diturunkan oleh kementerian pendidikan sebagaimana dipaparkan diatas, maka tentu menjadi suatu peluang yang sangat besar bagi setiap sekolah yang kemudian memiliki jumlah peserta didik yang

⁴⁰Ernawati, Bendahara sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

⁴¹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bos, Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, h. 4.

banyak, dikarenakan, turunnya anggaran kesekolah berdasarkan jumlah peserta didiknya.

Setiap perencanaan yang disusun itu melalui rapat internal sekolah, jadi tidak mudah dan tidak serta merta dalam menggunakan alokasi anggaran tersebut, dan tentu harus mengikuti juknisnya, sejauh ini kami Alhamdulillah telah menyusun rencana anggaran dan mengalokasikannya sesuai dengan perencanaan yang disepakatai.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah UPTD SD 84 Parepare, peneliti menemukan data bahwa perencanaan serta pengelolaan dana operasional sekolah pada taraf Sekolah Dasar khususnya di UPTD SD 84 Parepare. Dipandang sesuai dengan manajemen keuangan telah baik serta efektif dan pemanfaatan Dana disekolah tersebut dan tidak melenceng dari junnis dana Bantuan operasional tersebut.

Jika kemudian peneliti merujuk pada pihak penanggungjawab pelaksanaan manajemen keuangan menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendahara. *Otorisator* adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. *Ordonator* adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara di mana beberapa tugas pengelola keuangan lembaga sekolah/ pendidikan ialah :

Peranan sebagai penanggungjawab aktivitas keuangan ditingkat sekolah/ SD yaitu bendahara pastinya. Kemudian pejabat yang berwenang melakukan

⁴²Kaharudin, Kepala Sekolah UPTD SD 84 Parepare, wawancara.

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.⁴³

Hal yang sama dinyatakan oleh, kepala sekolah juga berperan sangat penting diantaranya:

Jadi kalau misalnya posisi sebagai kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam.⁴⁴

Berkaitan dengan konsep perencanaan yaitu tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian, perencanaan pada konsep biaya operasional sekolah di UPTD 84 Parepare ini merupakan suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara mendetail dari suatu kegiatan/pekerjaan yang dilakukan pihak sekolah untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis jika ditinjau pada aspek pendidikan dengan merujuk pada juknis pembelanjaan. Suatu perencanaan yang baik dan diharapkan mencapai hasil harus berisi berbagai kegiatan, mulai dari forecasting, objectives, policies, programes, schedules, procedures, dan bugget.

Pengelolaan keuangan memerlukan perencanaan terlebih dahulu didalam setiap kegiatan manajemen keuangan di instansi sekolah. Merencanakan itu sendiri pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan di masa yang akan datang (masa depan). Setiap perencanaan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai

⁴³Kaharudin, Kepala Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

⁴⁴Kaharudin, Kepala Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

sumber-sumber keuangan agar hasil yang akan dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin.

Peneliti kemudian menanyakan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu perencanaan anggaran, sebagaimana disampaikan bahwa:

Kami pada dasarnya mengikuti beberapa tahapan itu kalau kita mau menyusun dan pasti tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan mengatakan ketiga kegiatan itu adalah : (1) Perumusan tujuan yang ingin dicapai, (2) Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, (3) Identifikasi dan pengerahan sumber-sumber yang jumlahnya selalu terbatas⁴⁵

Merujuk pada penjelasan informan diatas maka sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan. Perencanaan merupakan siklus tertentu dan melalui siklus tersebut suatu perencanaan bisa dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian perencanaan.

Langkah-langkah penting perlu diperhatikan bagi perencanaan yang baik yaitu perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan seacara lengkap dan jelas. Tujuan merupakan keharusan bagi perencanaan, apabila tujuan itu banyak, maka tujuan yang dipilih adalah yang memudahkan dalam pencapaiannya skala prioritas perlu ditetapkan berdasarkan pertimbangan ini.

Pengalokasian Dana sesuai juknis dan RKAS yang sudah didesain buat perencanaan anggaran kebutuhan sekolah selama satu tahun, kepala sekolah juga ikut dan pada pengawasan pemanfaatan dana Bos yg dikelola oleh Bendahara sekolah

⁴⁵Kaharudin, Kepala Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

mulai di saat pertama kali dana tadi dicairkan hingga realisasi dana sesuai peruntukannya.

Hal yang sama dilakukan pada ketika realisasi dana bahwa sesuai juknis dana Bos dimana pihak kepala sekolah sudah mendapatkan laporan terkait dengan pengelola keuangan setiap pengeluaran serta barang yg sudah dibeli. Sehingga kepala sekolah mengetahui seluruh tentang pengadaan barang dan jenis barang yang diharapkan oleh sekolah. Contohnya pengadaan buku karena pada juknis sudah dipengaruhi bahwa 20% dari dana donasi operasional sekolah itu diperuntukkan buat pengadaan buku dan refrensi setiap tahunnya.

Alokasi anggaran itu pada pengadaan buku di perpustakaan menjadi wahana bagi peserta didik disekolah. Hak sebagai siswa di sekolah artinya menerima buku menjadi pedoman pada saat proses pembelajaran berlangsung sebagai akibatnya peserta didik berhak menerima buku setiap orangnya. Ketika terjadi kerusakan atau hilang serta telah tidak layak gunakan lagi maka tugas sebagai pengelola kepustakaan menyampaikan kepada pihak kepala sekolah bahwa stok perpustakaan wajib ditambah dan beberpa buku tidak layak lagi buat digunakan oleh peserta didik.

Berkaitan dengan juknis sebagai kepala sekolah pula mengetahui bahwa 15% dari dana donasi operasional sekolah diperuntukkan buat membayar honorarium tenaga pendidik yang Non PNS di sekolah tersebut. Jadi yang berprofesi menjadi kepala sekolah wajib mengetahui semua pemanfaatan Dana Bos serta memberi gaji tenaga pendidik Non PNS setiap triwulan sesuai jam mengajar dikelas.

Penelitian ini merujuk pada deskripsi managemen pengelolaan rencana anggaran maka dipandang perlu untuk menjabarkan pengalokasian rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sebagai berikut:

Tabel 4.2 Anggaran Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 DI UTPD SD 84 Parepare

NO	URAIAN	RKAS	REALISASI	SELISI
1	BELANJA PEGAWAI	26,600,000	26,800,000	200,000
2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,051,500	98,531,300	479,800
3	BELANJA MODAL	24,148,500	23,468,700	679,800
	TOTAL	148.800.000	148.800.000	1.359.600

Sumber Data Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare

Data diatas merupakan hasil akumulasi setiap anggaran yang dikeluarkan, peneliti kemudian membagi sub uraian pengeluaran menjadi 3 bagian. Peneliti memaparkan data secara lengkap pada bagian lampiran penelitian ini. Jika peneliti mengkaji secara mendalam terkait dengan alokasi uraian pengelolaan dana Bos yang telah dilakukan oleh UPTD SD 84 Parepare, maka beberapa alokasi dana telah dianggap sesuai dengan aturan juknis serta telah sesuai dengan konsep manajemen keuangan dalam perspektif islam.

Belanja anggaran pegawai memegang peran yang cukup significant dalam perencanaan anggaran, beberapa anggaran yang dikeluarkan melalui sub anggaea pegawai meliputi honor pegawai non PNS yang juga menjadi suatu kewajiban,

berdasarkan aturan terbaru, dimana pihak sekolah dapat menggunakan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah untuk pembayaran honorer di sekolah:

Selama ini itu tidak ada anggaran khusus yang diturunkan untuk memberikan gaji kepada guru maupun staf Honorer, namun sejak tahun 2019, kemudian juknis menyebutkan bahwa pembelajaran gaji honorer dapat di ambil melalui dana operasional sekolah.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, kemudian peneliti menyimpulkan bahwa anggaran pegawai tidak hanya meliputi panitia/Tim/maupun narasumber dari bebrbagai kegiatan yang dilaksanakan baik itu oleh organisasi sekolah maupun kepanitian lainnya.

Anggaran belanja pegawai, terdapat alokasi dana sebesar Rp26.600.000 yang kemudian realisasi dana yang juga dikeluarkan besaran yang sama sehingga telah tercapai rencana dan realisasi anggaran pada pengelolaan dana operasional sekolah pada UPTD 84 Parepare.

Berdasarkan penjelasan bendahara pada UPTD SD 84 Parepare pada saat diwawancara tentang implementasi perencanaan Dana bantuan Operasional Sekolah mengungkapkan bahwa:

Mengelola dana bantuan operasional ini sebenarnya tidak sulit bahkan dengan jumlah besar dananya saya mampu mengelolanya apabila kita mengerti juknis dana Bos dan mengikuti aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan dana sesuai pengalokasian dana yang sudah ditentukan, dan sebagai bendahara harus mampu menunjukkan sikap transparansi terhadap rekan- rekan di sekolah.⁴⁷

Berdasarkan penejelasan di atas maka kemudian peneliti menerangkan bahwa terdapat beberapa factor yang diperhatikan dalam juknis Dana Bos yang baru saat ini di tahun 2019 ada beberapa poin yang ada pada juknis Bos sebelumnya yg sudah

⁴⁶Sukmawati, Guru Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

⁴⁷Ernawati, Bendahara Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

dihilangkan oleh pemerintah itu sendiri, banyak hal yang berubah dari segi pemanfaatan dana bantuan operasional ditahun 2019 ini misalnya pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik baru serta beberapa kegiatan lainnya.

Perencanaan anggaran di sekolah itu seperti foto raport siswa baru dan foto ijazah bagi kelas VI itu sudah dicabut dari poin – poin yang lama, serta konsumsi untuk disekolah sudah tidak ada lagi diuknis baru. Yang menjadi kendala buat pengelola Dana Bos disekolah UPTD SD 84 Parepare sekarang adalah bagaimana menyikapi orang tua siswa yang biaya foto raport ataupun ijazah dibebankan kepada orang tua siswa itu sendiri⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas salah satu tata cara pengelolaan foto ijazah dengan mengadakan tabungan bulanan peserta didik sehingga diakhir kemudian orang tua siswa tidak merrasa keberatan dalam membayar biaya foto ijazah anak mereka, salah satu perencanaan tersebut telah di sosialisasikan kepada oran tua peserta didik.

Merujuk pada konsep *Comparative approach*, dimana penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan besarnya penerimaan dan pengeluaran untuk setiap mata anggaran untuk setiap tahun. Yang dapat dikaitkan terhadap hasil temuan dilapangan yaitu dengan membandingkan setiap tahapan anggaran yang diturunkan melalui kementrian pendidikan. Sedangkan *Planning Programming Budgeting Evaluation System*,(PPBES), penganggaran yang berorientasi pada rencana dan sarana program secara khusus daan umum, kemudian seluruh aspek yang dianggarkan oleh pihak kepala sekolah dan bendahara telah sesuai dengan rencana dan berorientasi pada kualitas mut sekolah.

Berdasarkan hasil temuan bahwa salah satu alasan yang mengapa pengelola dana bantuan operasional sekolah bendahara bisa mengelola dana sekolah dengan baik, karena yg bertanggung jawab atas pembayaran buat barang -barang,

⁴⁸Ernawati, Bendahara Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

pembayaran honorarium bagi energi pendidik yang Non PNS, pembelian buku dan pembayaran daya dan jasa yg dipergunakan oleh sekolah dan juga pengeluaran terkait dengan kegiatan kesiswaan dan pembenahan sekolah.

Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel harus dilakukan oleh bendahara memang, karena memang kami yg sangat bertanggung jawab dalam mengeluarkan anggaran tersebut.⁴⁹

Peneliti selanjutnya menunjukkan peranan bendahara dalam pengelolaan keuangan karena mulai di saat perencanaan penggunaan Dana hingga pada pencairan bahkan pengeluaran dan pelaporan menjadi bendahara harus teliti dalam hal tersebut. Bendahara bertugas sebagai pengelola keuangan sekolah.

C. Realisasi Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.

Rumusan masalah kedua, peneliti kemudian menjelaskan secara jelas terkait dengan realisasi dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare, peneliti melakukan mengambil data dari informan yang secara langsung berupa realisasi dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran. Materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kelapa sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa sekolah alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.⁵⁰

⁴⁹Ernawati, Bendahara Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

⁵⁰Bambang Ismaya, *Pengelolaan Pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama 2019).

Dana Biaya Operasional Sekolah yang diberikan oleh pemerintah, jadi diharapkan setiap sekolah akan lebih kreatif untuk melakukan hal-hal yang lebih inovatif, dan diharapkan kepada siswa-siswi untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksakan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat memenuhi mutu dan produktifitas sumber daya manusia yang unggul.

Gambar 4.3 Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019
Di UPTD SD 84 Parepare

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	ANGGARAN	PENGUNAAN DANA							JUMLAH	SALDO	KET.	
				ATK	BELANJA		BELANJA PEGAWAI		BELANJA JASA					
					BELANJA NON MODAL	BELANJA MODAL	PNS	NON PNS	TRANSPORT	KONSUMSI				SEWA, DAYA DAN JASA
1.	TAHAP I	-	28.960.000	2.428.000	5.888.300	6.524.000	-	4.650.000	750.000	-	8.719.700	28.960.000	-	
2.	TAHAP II	-	57.920.000	1.749.500	5.039.300	16.944.700	600.000	8.800.000	8.655.000	269.000	15.862.500	57.920.000	-	
3.	TAHAP III	-	28.960.000	3.022.000	6.745.000	-	600.000	6.000.000	6.115.000	98.000	6.380.000	28.960.000	-	
4.	TAHAP IV		32.800.000	-	11.776.400	-	600.000	5.550.000	4.200.000	-	10.673.600	32.800.000	-	
	JUMLAH		148.640.000	7.199.500	29.449.000	23.468.700	1.800.000	25.000.000	19.720.000	367.000	41.635.800	148.640.000		

Sumber Data: SD 84 Parepare 2019

Realisasi penggunaan dana biaya operasional sekolah pada tahun 2019, dapat di simpulkan bahwa dana yang keluar pada tahun 2019 sebanyak Rp148.640.000 melalui empat tahapan telah memenuhi aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dana BOS, diantaranya pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kulikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru,

membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, dan pembelian perangkat komputer.

Dengan jumlah tahap pertama Rp28.960.000, tahap kedua Rp57.920.000, tahap ketiga Rp28.960.000, dan tahap keempat Rp32.800.000. Dana biaya operasional sekolah dialokasikan pada sekolah berdasarkan pada jumlah siswa yang ada di sekolah. Adapaun siswa di sekolah UPTD SD 82 Parepare pada tahun 2019 sebanyak 195 siswa.

D. Evaluasi Manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare.

Rumusan masalah ketiga, peneliti kemudian menjelaskan secara jelas terkait dengan efektifitas manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang secara langsung mendapatkan dampak serta feedback atas hasil pengelolaan dana BOS tersebut, beberapa guru serta staf di UPTD SD 84 Parepare

Salah satu informan yang merasakan dampak yaitu guru mata pelajaran yang ternyata sangat terbantu dengan adanya Dana BOS tersebut, sebagaimana disampaikan bahwa:

Sangat nyaman dilihat dari segi pengelolaannya itu sangat bagus dan transparansi dan apabila ada kegiatan sekolah atau kesiswaan sebagai Bendahara dan Kepala Madrasah selalu memberikan wewenang kepercayaan kepada guru untuk mengelola dana yang dibutuhkan pada saat berkegiatan bukan malah mereka yang berprofesi sebagai pengelola keuangan yang mencover semuanya dengan tujuan penyimpangan dana⁵¹

Peneliti berpendapat bahwa setiap pengelolaan Dana operasional sekolah haruslah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati serta transparan terhadap

⁵¹Sumarni, Guru Olahraga Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

setiap aspek transaksi yang keluar, penggunaan Dana yang tidak hanya berfokus pada pengembangan fasilitas namun juga pada aspek pengembangan kualitas pengajar dan peserta didik.

Begitupun pada saat penerimaan siswa didik baru sebagai pengelola menunjuk salah satu guru untuk menerima peserta didik baru dan memberikan kepercayaan penuh atas kegiatan tersebut adapun kebutuhan pada saat proses penerimaan peserta didik baru berlangsung sebagai pengelola keuangan memberikan ruang penuh kepada guru untuk mengatasi hal tersebut dengan catatan pengelola hanya menerima uraian dan list kebutuhan dari guru yang bertugas⁵²

Bentuk efektifitas dari manajemen keuangan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan adanya kepercayaan penuh yang diberikan kepada pihak panitia pelaksana kegiatan seperti halnya kegiatan – kegiatan keorganisasian serta beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik dan kerohanian, hal tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan terkait dengan pengalokasian Dana operasional sekolah dapat dipandang sebagai suatu pengelolaan yang transparan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang pemanfaatan dana Bantuan Operasional sekolah terhadap guru maka sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa tugas sebagai seorang guru yang terkadang berperan dan ikut serta dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di UPTD SD 84 Parepare yaitu memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukannya.

Berdasarkan teori keefektifan pendidikan (*educational effectiveness*) dimana menawarkan harapan bahwa pengelolaan sekolah berbasis MBS akan mendorong peningkatan prestasi belajar siswa. Penganjur konsep ini berharap hal tersebut akan

⁵²Kartini, Guru Sekolah UPTD SD 84 Parepare, wawancara.

terjadi melalui kurikulum yang fleksibel (*flexible curriculum offerings*) yang ditawarkan (*tailored*) kepada siswa disekolah-sekolah tertentu.

Peneliti mengaitkan konsep dari teori tersebut sebagai dasar pertanyaan dalam menguji tingkat efektifitas dari manajemen pengelolaan dana sebagaimana dijelaskan bahwa:

Selama ini memang bendahara, kepala sekolah, dan beberapa peranan dari seluruh aspek sekolah itu selalu melakukan koordinasi yang baik dalam menyusun, mengolah serta membelanjakan dana sesuai dengan perencanaan yang matang memang.⁵³

Peranan yang dilakukan juga harus sesuai dengan langkah dan tugas setiap pemegang tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatannya, baik itu kegiatan sekolah maupun kegiatan pembangunan dalam hal ini kontraktor yang diberikan amanah dalam pembangunan ruang kelas, dan gedung lainnya. Jika peneliti mengaitkan setiap pengelolaan Dana yang dilakukan oleh pihak UPTD SD 84 Parepare jika ditinjau dari aspek manajemen keuangan maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Merencanakan anggaran, yaitu Bendahara UPTD SD 84 Parepare senantiasa mengidentifikasi tujuan anggaran, menentukan prioritas anggaran, serta menjabarkan tujuan anggaran kedalam rancangan operasional yang dapat diukur, serta menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran anggaran tersebut.
2. Mempersiapkan anggaran, yaitu kepala sekolah dan bendahara serta para wakil kepala sekolah menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sarana program pengajaran perlu dirumuskan

⁵³Sahira, Guru Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.

3. Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu pihak kepala sekolah serta bendahara mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, memmbuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu khusus bagi pengawas dan kepala sekolah menilai pelaksanaan program belajar mengajar, menilai bagaimana mencapai sarana program serta mebuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Proses penyusunan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana anggaran. Namun perencanaan tersebut tidaklah mudah:

Jadi sangat banyak faktor yang memengaruhi proses penyusunan anggaran itu di sekolah, seperti jumlah dan keadaan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan fasilitas belajar mengajar, sama factor harga dan lainnya, jadi smua itu haruslah dipertimbangkan dengan matang.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas tentu menjadi faktor agar dapat mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah, yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan administratif. Kemampuan untuk menjalankan program serta kegiatan dalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja.

⁵⁴Nurjannah Sabri, Guru Sekolah UPTD SD 84 Parepare, *wawancara*.

Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rutin atau mekanis, melainkan melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud dari pendidikan dan program. Berdasarkan perpektif tersebut, pembuatan anggaran belanja dapat menjadi alasan bagi sekolah untuk pembangunan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan merancang cara-cara bagi pencapaiannya.

Manajemen keuangan sekolah sering kali mengalami kendala misalnya pelaporan pertanggungjawaban sehingga manajemen sekolah terus tidak efektif. Namun ketika kita berdasarkan pada manajemen keuangan sekolah yang berbasis syariah itu bisa menjamin bahwa pelaporan keuangan tidak mengalami kendala karena dengan berbasis syariah berarti kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai islam dalam pelaporan pertanggungjawaban. Salah satu bukti tercapainya pengelolaan Dana operasional sekolah yaitu tercapainya beberapa indikator berikut ini:

1. Transparansi Laporan Anggaran

Manajemen Keuangan adalah salah satu indikator yang menjadi rujukan atas tercapainya system keuangan yang baik yaitu dengan adanya manajemen yang baik serta transparansi laporan anggaran. Transparan berarti adanya keterbukaan., UPTD SD 84 Parepare telah melakukan Transparan pada manajemen keuangannya khususnya laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan juga telah transparansi. Di lembaga pendidikan/sekolah, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan lembaga pendidikan, yaitu: keterbukaan sumber keuangan

dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya telah jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2. Akuntabilitas dalam Pengalokasian dana

Indikator manajemen keuangan ditinjau dari aspek akuntabilitas dimana manajemen keuangan bendahar serta pengalokasian anggaran itu dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut telah diberlakukan oleh bendahara serta kepala sekolah pada lingkup sekolah UPTD SD 84 Parepare.

Akuntabilitas dalam manajemen keuangan ini sehingga penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dengan tiga pilar utama yang menjadi rujukan akuntabilitas disekolah yang diberlakukan oleh pihak UPTD 84 Parepare: (1) adanya tranparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

3. Efisien dan sesuai dengan Juknis Anggaran

Indikator yang menjadi rujukan dari tercapainya manajemen keuangan yang baik ialah efektifitas dan efisiensi penggunaan anggarann pada satuan pendidikan khususnya di UPTD SD 84 Parepare. Tingkat efisien dan efektivitas yang tinggi tentunya memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap siswa serta orang tua yang akan secara langsung mendapatkan manfaat dari adanya dana anggaran Bantuan oprasional sekolah tersebut. Pada dasarnya pihak bendahara dan pengelola dana anggara bantuan sekolah itu telah tercapai dan dapat dikategorikans sebagai anggara yang efektif dan efisien.

Penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Sehingga para warga sekolah merasa nyamans erta terbantu dengan adanya alokasi dana tersebut. Jadi, dalam manajemen keuangan sekolah yang perlu diperhatikan adalah beberapa prinsip agar manajemen keuangan dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektif merupakan efektivitas lebih dalam karena efektivitas tak berhenti pada tujuan tercapai saja tetapi samapai pada kualitatif hasil yang berkaitan dengan pencapaian visi lembaga.⁵⁴

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektif kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut yang kemudian menjadi rujukan dasar pada pengalokasian dana di UPTD SD 84 Parepare.

Disisi lain manajemen keuangan pada UPTD 84 Parepare dan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas diartikan untuk menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.⁵⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa setiap aspek dalam manajemen keuangan bendahara serta kepala sekolah dan seluruh stakeholder pada sekolah tersebut telah efektivitas sebagai ukuran untuk menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Sekolah yang efektif pada umumnya menunjukkan kedekatan/kemiripan antara hasil nyata dan hasil yang diharapkan.

⁵⁵ Minarti, *Manajemen Sekolah, Manajemen Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224-226.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (analisis manajemen keuangan syariah) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare telah sesuai pada aturan juknis, peneliti mengkaji secara mendalam terkait dengan alokasi uraian pengelolaan dana Bos telah dianggap sesuai dengan aturan juknis dan pengalokasian anggaran telah mengacu pada sub anggaran diantaranya yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang telah sesuai dengan konsep manajemen keuangan dalam perspektif islam.
2. Realisasi penggunaan dana biaya operasional sekolah pada tahun 2019, telah memenuhi aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pengalokasian dana BOS, diantaranya pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kulikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, dan pembelian perangkat komputer yang dilakukan dengan empat tahap pengalokasian dana.
3. Efektivitas manajemen keuangan syariah terhadap pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare telah tercapai sesuai

dengan manajemen keuangan, ketiga sub anggaran telah tercapai sesuai dengan indikator efektifitas manajemen keuangan ditinjau dari aspek transparansi yaitu adanya keterbukaan dengan melakukan transparan pada manajemen keuangannya khususnya laporan keuangan. Akuntabilitas manajemen keuangan dimana pengalokasian anggaran dinilai oleh orang lain berdasarkan kualitas performasinya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Efektifitas serta tingkat efisien yang tinggi tentunya memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap siswa serta orang tua yang akan secara langsung mendapatkan manfaat dari adanya dana anggaran Bantuan operasional sekolah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait efektivitas pengelolaan Dana bantuan operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (analisis manajemen keuangan syariah). Sebagai masukan yakni, peneliti menyarankan agar pelaporan anggaran dapat lebih transparan lagi, dimana setiap sub anggaran jauh lebih baik dijelaskan secara terperinci sesuai dengan alokasinya, sehingga pelaporan tidak dalam bentuk 1 format pelaporan Dana anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Anwar, Moch. Idochi. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan.*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2013.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2014.
- Atomodiwirio Soebagio.2000.*Manajemen Pendidikan Indonesia.*, Jakarta: PT. Ardadizya Jaya.
- Bambang, *Pengelolaan Pendidikan.*, Bandung: PT Refika Aditama 2019.
- Darmawan, Deni Akdon Dr. Dedy Achmad Kurniady.2017.*Manajemen Pembiayaan Pendidikan.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Elfachmi, Amin Kueife. *Pengantar Pendidikan.*, Jakarta: PT. Gelorah Aksara Pratama 2016.
- Fattah, Nanang. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik.*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2016.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan.*, Jakarta: PT RajaGrafindo PersadaIsmaya 2010.
- Makmun, Abin Syamsuddin Udin Syaefudin Sa'ud. *Perencanaan Pendidikan.*, Bandung: PT. Remaja Rodakarya 2014.
- Marni, Arita. *Manajemen Sekolah Dasar.*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2014.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah.*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offsey 2004.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah.*, Bandung: PT Rosda Karya 2006.
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah.*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007.
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan.*, Anggrek 126 sambilegi, maguwoharjo, depok, slema, Jogjakarta: ar-ruzz media group 2010.
- Satori Djam'an, Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Bandung: Alfabeta 2017.

- Sewang, Anwar. *Manajemen Pendidikan.*, Malang: Wineka Media Belajar Sepanjang Hayat 2015.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Study Kasus.*, Sidoarjo: CV.Citra Media 2003.
- Siswanto, *Pengantar Manajemen.*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2014.
- Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah.*, Bandung: CT Pustaka Setia 2017.
- Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah.*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.*, Bandung: Alfabeta 2019.
- Tanjung, Didin Hafidhuddin Hendri. *Manajemen Syariah Dalam Praktik.*, Jakarta: Gema Insasi Press 2003.
- Zubair, Muhammad Kamal. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi.*, Parepare: IAIN Parepare Nusantra Press 2020.

Skripsi

- Aini Qorry, Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Al-Misbah)., Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang 2018.
- Herdiawan Hamdan Muhammad Imad, *Peran Biaya Operasional Pendidikan Terhadap Auput Pendidikan.*, (Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan Agustus Vol. 1 No. 2 2019).
- Lian, Hilda Ong Tjun. *Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Studi Lapangan Tahun Ajaran 2005-2006).*, (Jurnal Perkotaan Desember Vol. 4. No.2 2012).
- Mellani, Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Pada SMA Aisyiyah 1 Palembang., Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Palembang 2016.
- Sultoni Hasan. *Evolusi Manajemen Keuangan Syariah: Perkembangan Pada Zaman Rasulullah Sampai Sekarang.*, (Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam Vol. 4. No.1 2017).
- Syamsir, Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Smp Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo Kab.Sidrap., Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 2014.

Yuliana, Suharsimi Arikunto Lia. *Manajemen Pendidikan.*, Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2009.

Internet

Bab II Kajian Kepustakaan, Landasan Teori Efektifitas.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.umpalembang.ac.id/id/erprint/3454//2/222015153_BAB%2520II_SAMPAI%2520BAB%2520TERAKHIR.pdf&ved=2ahUKEwjN9tDmmKDxAhVw8XMBHeRIC4YQFjABegQIBBAG&usg=AOvVaw38AjfvXthoew-wFw_CkeCx



Lampiran 01 : Instrument Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telepon (0421) 21307, Faksimile (0421) 2404
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURHAYATI
NIM : 17.2900.062
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BIAYA
OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 DI UPTD
SD 84 PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Narasumber

1. Apa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare?
2. Apakah prinsip perencanaan penggunaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare?
3. Apakah target efektivitas dalam penggunaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare telah tercapai?
4. Apakah program-program pada dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare telah terlaksana?
5. Bagaimana pengukuran pengelolaan dana biaya operasional sekolah tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare,

2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag)
NIP. 19730129 200501 1 004

Pembimbing pendamping



(Dr. Damirah, S.E, M.M)
NIP. 19760604 200604 2 001



Lampiran 02 : Keterangan Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama lengkap : Kaharuddin, S.Pd.M.M

Umur : 53

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Benar telah melakukan wawancara oleh Nurhayati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

19-12-2021

Yang bersangkutan



Informan

Lampiran 02 : Keterangan Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama lengkap : Sunarmi - S. Pd

Umur : 53

Pekerjaan : Guru SD reg 84 pare pare

Benar telah melakukan wawancara oleh Nurhayati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

07-01-2022

Yang bersangkutan


Informan

Lampiran 02 : Keterangan Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama lengkap : Ernawati, S.Pd

Umur : 36

Pekerjaan : Bendahara

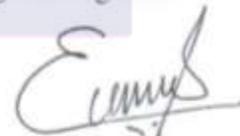
Benar telah melakukan wawancara oleh Nurhayati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

13-12-2021

Yang bersangkutan


Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama lengkap : Sukmawati Sutan, S.pd.1

Umur : 32

Pekerjaan : Guru Agama

Benar telah melakukan wawancara oleh Nurhayati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

14-12-2021

Yang bersangkutan


Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama lengkap : Saharia, S. Pd

Umur : 36 tahun

Pekerjaan : Guru

Benar telah melakukan wawancara oleh Nurhayati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) “

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

01-02-2022

Yang bersangkutan


Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama lengkap : NURJANNA SABRI, S.Pd

Umur : 25 TAHUN

Pekerjaan : GURU

Benar telah melakukan wawancara oleh Nurhayati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

07-02-2022

Yang bersangkutan


Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama lengkap : KARTINI, S.Pd

Umur : 33 TAHUN

Pekerjaan : GURU

Benar telah melakukan wawancara oleh Nurhayati untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

07-01-2022

Yang bersangkutan



Informan

Lampiran 03 : Rencana Anggaran

RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN 2019

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 84 PAREPARE

KELURAHAN : BUMI HARAPAN

KECAMATAN : BACUKIKI BARAT

KOTA : PAREPARE

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

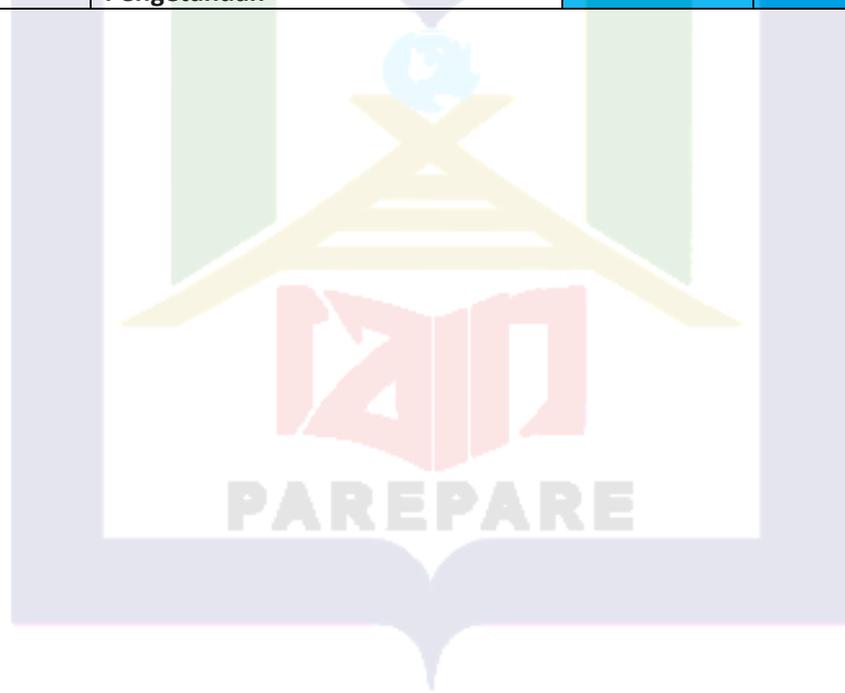
148,800,000

KODE REKENING	URAIAN	RKAS	REALISASI	SELISI
1	2	4	5	6
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26,600,000	26,800,000	(200,000)
	Honor Bulanan Non PNS	22,200,000	25,000,000	(2,800,000)
	Honor Panitia/Tim/Narasumber	4,400,000	1,800,000	2,600,000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98,051,500	98,531,300	(479,800)
5.2.2.01.	Belanja Pakai Habis	27,132,000	28,586,500	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,934,000	7,199,500	(265,500)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, baterai kering dll)	2,200,000		2,200,000
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420,000	471,000	(51,000)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3,072,000	1,196,000	1,876,000
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	35,000	-	35,000

5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	14,200,000	19,720,000	(5,520,000)
5.2.2.01.17	Belanja Bahan Laboratorium	16,000	-	16,000
5.2.2.01.19	Belanja Obat-obatan	255,000	-	255,000
5.2.2.01.20	Belanja Makan Minun Hewan ternak			
5.2.2.02	Belanja Bahan Material	470,000	382,500	
5.2.2.02.07	Belanja Alat-alat Praktek dan Olahraga	70,000	-	70,000
5.2.2.02.13	Belanja Barang Inventaris	400,000	382,500	17,500
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,640,000	31,699,000	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon			
5.2.2.03.02	Belanja Air	7,200,000	7,364,900	(164,900)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7,200,000	5,009,100	2,190,900
5.2.2.03.04	Belanja Kontribusi kebersihan	240,000	240,000	-
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,620,000	2,685,000	(1,065,000)
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel	5,560,000	6,580,000	(1,020,000)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi			
	Pihak Ketiga	9,820,000	9,820,000	-
	Kontribusi			

5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,596,000	9,641,800	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,100,000	544,000	556,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,496,000	9,097,800	(2,601,800)
5.2.2.10	Belanja Sewa dan Perlengkapan Kantor	200,000	-	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian adat/tradisional	200,000	-	200,000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,197,000	367,000	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	425,000	367,000	58,000
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,172,000	-	1,172,000
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,600,000	-	1,600,000
5.2.2.14	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,700,000	7,738,000	
5.2.2.15.02	-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,700,000	7,738,000	(38,000)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,116,500	20,116,500	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,018,500	3,018,500	-
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17,098,000	17,098,000	-
5.2.3	Belanja Modal	24,148,500	23,468,700	679,800
5.2.3.28	Belanja Modal Kebutuhan sekolah			

		8,152,000	7,475,000	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Pengadaan Meubelair	8,152,000	7,475,000	677,000
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan	4,900,000	4,900,000	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Pengadaan PC	4,900,000	4,900,000	-
				-
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,096,500	11,093,700	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya + Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan	11,096,500	11,093,700	2,800



Lampiran 04 : Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4488/In.39.8/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHAYATI
Tempat/ Tgl. Lahir : TUPPU, 11 JUNI 1997
NIM : 17.2900.062
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : LAMBALUMAMA, KELURAHAN TADOKKONG,
KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 DI UPTD SD 84 PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 November 2021

Dekan,



amil
Hamad Kamal Zubair

Lampiran 05 : Surat Rekomendasi Penelitian

SRN IP000806


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 808/IP/DPM-PTSP/12/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliban, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **NURHAYATI**
NAMA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**
Jurusan : **LAMBALUMAMA, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG**
ALAMAT : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
UNTUK : **JUJUL PENELITIAN : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 DI UPTD SD 84 PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE (UPTD SD NEGERI 84 PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **03 Desember 2021 s.d 03 Januari 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal: **08 Desember 2021**

PIU. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Dra. Hj. AMINA AMIN
Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19630808 198803 2 012**

Biaya : Rp. 0,00

Lampiran 06 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI 84 PAREPARE

Alamat: Jl. Beringin No. 14 A Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat
Email: sdn84.parepare@gmail.com



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :421.2/007/UPTD-SD 84/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya :

Nama : Kaharuddin S.Pd., M.M.
NIP : 19680707 199112 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Identitas di bawah ini :

Nama : Nurhayati
Tempat/Tgl. Lahir : Tuppu, 11-06-1997
NIM : 17.2900.062
Semester : IX
Alamat : Lambalumama

Telah selesai melakukan penelitian di UPTD SD 84 Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 03 Desember 2021 s/d 03 Januari 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BLAYA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2019 DI UPTD SD 84 PAREAPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Januari 2022

Kepala Sekolah

Kaharuddin, S.Pd., M.M.
NIP. 19680707 199112 1 001

Lampiran 07 : Dokumentasi



Gambar 01: Kepala Sekolah



Gambar 02: Guru



Gambar 03: Guru



Gambar 04: Bendahara



Gambar 05: Guru



Gambar 06: Guru



Gambar 07: Guru



BIODATA PENULIS

NURHAYATI nama panggilan Hayati lahir di Tuppu, 11 Juni 1997. Anak kedua dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Ismail dan Ibu Mansa. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 225 Lambalumama pada tahun 2005 dan Lulus tahun 2011, SMPN 1 Lembang pada tahun 2011 dan lulus tahun 2014, melanjutkan jenjang di MA DDI Enrekang pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017. Kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Manajemen Keuangan Syariah, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada Tahun 2020 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Sabbang Paru pada tahun 2020 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 di UPTD SD 84 Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”